Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran

Policy Brief

WUJUDKAN AKSES AIR MINUM YANG AMAN DAN SANITASI LAYAK BAGI PEREMPUAN PESISIR

Oktober 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Temuan Audit Sosial dan Analisis Anggaran Koalisi PRIMA menunjukkan sebagai berikut :

   a. Hasil Audit Sosial 2023-2025 di kawasan pesisir menunjukkan bahwa 41% rumah tangga belum memiliki akses sanitasi aman, dan hanya 20% yang terhubung dengan jaringan pipa air bersih. Sedangkan di kampung kota 86% rumah tangga belum menikmati sanitasi aman serta 55% yang sudah terhubung jaringan pipa air bersih.

   b. RPJMN 2025-2029 menargetkan akses air minum aman dan akses air minum perpipaan berturut-turut sebesar 42% dan 40,2% inkonsisten dengan komitmen anggaran DAK Tahun 2026 sebesar Rp151,1 triliun.

   c. Kajian dan audit sosial Koalisi PRIMA tahun 2023-2025 menemukan fakta peningkatan akses dan kualitas layanan WASH sangat bergantung pada alokasi DAK karena sempitnya ruang fiskal Pemerintah Daerah.

   d. Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 sebesar 25%, meskipun kemudian direvisi dengan menaikkannya dari Rp 649,9 triliun menjadi Rp 693 triliun semakin melemahkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai layanan dasar, terutama di wilayah pesisir yang sudah rentan.

   e. Dalam pemetaan partisipatif tahun 2023, perempuan merupakan penanggung jawab utama dalam keluarga untuk menyediakan air bersih, fasilitas sanitasi dan pengelolaan sampah, sehingga perempuan mengalami beban ganda.

   f. Pada 8 pemukiman pesisir ditemukan adanya tantangan dan hambatan dalam pemenuhan layanan sanitasi, air bersih dan pengelolaan sampah akibat lahan yang masih berstatus Hak Pakai, HPL, dan HGB.

2. Atas temuan tersebut, maka Koalisi PRIMA memberikan rekomendasi sebagai berikut :

   a. Koalisi PRIMA mendorong Pemerintah untuk konsisten mengalokasikan anggaran untuk DAK Fisik Bidang Air, sehingga target RPJMN 2025-2029 terhadap akses air minum aman dan akses air minum perpipaan secara berturut-turut sebesar 42 % dan 40,2 % dapat tercapai.

   b. Koalisi PRIMA mendorong Pemerintah memprioritaskan DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi untuk wilayah-wilayah pesisir.

   c. Koalisi PRIMA mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota) segera membentuk Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang mengedepankan keterlibatan kelompok perempuan dan organisasi masyarakat sipil.

   d. Koalisi PRIMA mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengoptimalkan Pokja PKP untuk pemenuhan akses air minum/bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah, termasuk masalah rob dan abrasi di kawasan permukiman/kampung pesisir.

   e. Koalisi PRIMA mendesak Pemerintah untuk memastikan terpenuhinya layanan dasar WASH di wilayah perkampungan pesisir.

   f. Koalisi PRIMA mendesak Pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan untuk mendapatkan pemukiman dan lahan pangan yang layak untuk hidup sejahtera. Hal ini menuntut keselarasan kebijakan antar-Kementerian ATR/BPN, KKP, dan KLHK terkait penerbitan AHT di wilayah pesisir.

PENDAHULUAN

Koalisi PRIMA (Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) yang di dalamnya terdiri atas International Budget Partnership (IBP) Indonesia; Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA); Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI); Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI); Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI); Perkumpulan Inisiatif, Kota Kita, dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Koalisi PRIMA aktif mendorong peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar sektor kesehatan dan WASH, melalui proses perencanaan penganggaran yang inklusif untuk penyandang disabilitas dan masyarakat pesisir.

Visi pembangunan Prabowo–Gibran yang tertuang dalam ASTA CITA menempatkan layanan dasar yang inklusif sebagai pilar penting pembangunan nasional. Layanan tersebut meliputi air minum layak, sanitasi layak, hunian aman, dan perlindungan kelompok rentan sebagaimana tercantum dalam Asta Cita butir 4. Dalam kerangka ini, layanan dasar dipahami tidak hanya sebagai penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial untuk membuka akses, mengurangi risiko kesehatan, dan menutup ketimpangan antardaerah, khususnya di kawasan pesisir yang selama ini tertinggal dalam pembangunan.

Komitmen peningkatan layanan dasar memperoleh pijakan fiskal melalui Nota Keuangan RAPBN 2026 yang menekankan belanja negara dan prioritas infrastruktur. Meski ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur cukup besar, distribusi manfaat untuk layanan air dan sanitasi rumah tangga, terutama di wilayah pesisir, belum sebanding dengan skala permasalahan yang ada. Dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 menjadi acuan penting untuk menilai bagaimana janji layanan dasar tersebut diterjemahkan ke dalam alokasi anggaran dan program yang benar-benar operasional.

Capaian indikator WASH nasional menunjukkan tren positif, tetapi masih menyisakan kesenjangan signifikan antarwilayah. Data BPS (Susenas 2023) mencatat akses air minum layak telah mencapai 91,72% rumah tangga, sementara akses sanitasi layak baru 82,36%. Kesenjangan ini semakin jelas terlihat di tingkat provinsi, misalnya Jawa Barat yang hanya mencapai 74,88% untuk sanitasi layak, lebih rendah dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan sekadar memperluas cakupan secara nasional, melainkan juga memastikan pemerataan antarwilayah, terutama di perkotaan padat dan kawasan pesisir yang sering tertinggal.

Perubahan iklim memperburuk tantangan layanan dasar di kawasan pesisir Indonesia. BMKG mencatat kenaikan muka laut nasional 2014–2023 rata-rata ~10 mm/tahun, lebih tinggi dari rata-

Foto Seorang perempuan di pesisir Makassar mendorong gerobak air bersih.

rata global ~4,7 mm/tahun. Kondisi ini diperparah oleh penurunan tanah akibat ekstraksi air tanah berlebih yang memicu banjir rob, intrusi air asin, dan degradasi akuifer. Contohnya, di DKI Jakarta rata-rata penurunan tanah pada 2023 mencapai 3,9 cm/tahun dengan ratusan titik terdampak, sementara peta intrusi air laut menunjukkan perambatan ke daratan sejak 2007–2024. Situasi tersebut berimplikasi langsung pada kualitas dan kuantitas sumber air baku masyarakat pesisir.

Di lapangan, krisis air bersih dan sanitasi di pesisir bersifat kronis dan kompleks. Empat kab/kota besar—Balikpapan, Karawang, Surabaya, dan Makassar—menggambarkan ragam masalah yang menyatu:

- Kota Balikpapan: cakupan layanan PDAM sekitar 80% (2022) dengan kebutuhan melebihi pasokan; kebocoran jaringan menambah inefisiensi.
- Kabupaten Karawang: kualitas air baku terancam kontaminasi minyak & lemak di saluran irigasi yang terhubung ke DAS Citarum—salah satu yang paling tercemar—yang mempersulit pengolahan air minum.
- Kota Surabaya: masih terdapat permukiman bantaran sungai dengan layanan MCK dan drainase terbatas; penataan berlangsung, tetapi backlog sanitasi di kantong kumuh tetap nyata.
- Kota Makassar: krisis air berulang yang dipicu El Niño serta daya dukung lingkungan yang menurun—mempengaruhi ribuan warga, menunjukkan kegentingan tata kelola pasokan dan distribusi.

Krisis layanan dasar di pesisir semakin berat karena berkelindan dengan ketidaksetaraan gender. Perempuan di kampung nelayan sering menanggung beban ganda, mulai dari mengantre dan mengangkut air yang mengurangi kesempatan ekonomi, merawat keluarga saat terjadi wabah diare, ISPA, atau penyakit kulit akibat sanitasi buruk, hingga menghadapi keterbatasan hak kesehatan reproduksi karena fasilitas yang minim. Literatur global (WHO/UNICEF JMP, 2023) juga menegaskan bahwa kegagalan pemenuhan layanan WASH berdampak langsung pada penurunan partisipasi pendidikan dan kerja perempuan serta meningkatkan risiko kesehatan, termasuk stunting akibat diare berulang pada anak.

Kesenjangan antara visi layanan dasar inklusif dan realisasi program di wilayah pesisir perlu segera ditutup dengan prioritas kebijakan yang tepat. Catatan masyarakat sipil menekankan pentingnya infrastruktur dasar rumah tangga—air minum, sanitasi, drainase lingkungan, serta pengelolaan limbah dan sampah—dibandingkan proyek padat modal yang manfaatnya lambat dirasakan kelompok rentan. Pada saat yang sama, agenda pemerintah dalam RAPBN 2026, program pengamanan pantai, dan pengendalian banjir rob harus dikaitkan dengan tata kelola WASH yang mengurangi risiko iklim di permukiman pesisir, bukan semata melindungi aset ekonomi makro. Dengan demikian, membangun permukiman pesisir yang sehat dan produktif menjadi pilihan rasional sekaligus etis.

PERMASALAHAN

1. Krisis Layanan Dasar WASH di Kawasan Pesisir

Hasil Audit Sosial 2023-2025 di kawasan pesisir menunjukkan bahwa 41% rumah tangga belum memiliki akses sanitasi aman, dan hanya 20% yang terhubung dengan jaringan pipa air bersih. Terlebih, capaian program pemerintah melalui SKAM-RT Kemenkes 2023 menunjukkan akses air minum baru 20,49% dan data Kementerian PUPR 2024 mencatat capaian perpipaan baru 30,12%.

Kebijakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026 diarahkan untuk meningkatkan akses air minum rumah tangga yang terjamin kualitasnya. Peningkatan tersebut dilakukan melalui pengelolaan dan pengawasan mutu air dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi, kebijakan pendanaan, serta peran masyarakat.

Transfer ke Daerah (TKD) juga diharapkan mendukung pencapaian swasembada air melalui DAK Fisik bidang air minum. Dukungan ini diwujudkan dengan program perluasan, peningkatan, dan pembangunan baru jaringan perpipaan SPAM. Namun, terdapat inkonsistensi antara target RPJMN 2025–2029—yaitu 42% akses air minum layak dan aman dan 40,2% akses air minum perpipaan—dengan alokasi DAK tahun 2026 yang hanya mencapai Rp 151,1 triliun.

Rata-rata Pemerintah Daerah masih memiliki ketergantungan terhadap TKD hingga 66%. Berdasarkan PMK No. 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 330 kabupaten/kota di Indonesia masih sangat bergantung pada TKD. Sementara Kajian dan Audit Sosial Koalisi PRIMA tahun 2023-2025 menemukan fakta peningkatan akses dan kualitas layanan WASH sangat bergantung pada alokasi DAK karena sempitnya ruang fiskal Pemerintah Daerah.

Kebijakan pemangkasan TKD dalam RAPBN 2026 melemahkan kemampuan daerah untuk membiayai layanan publik, terutama di kawasan pesisir yang rentan. Meskipun pemotongan 25% kemudian direvisi dengan kenaikan

dari Rp 649,9 triliun menjadi Rp 693 triliun, anggaran tersebut diperkirakan hanya cukup untuk menutup belanja operasional rutin. Akibatnya, ruang fiskal untuk peningkatan kualitas layanan dasar tetap terbatas dan berpotensi memperburuk ketimpangan layanan.

Keterbatasan akses layanan dasar di wilayah pesisir perkotaan semakin menegaskan dampak dari lemahnya kapasitas fiskal daerah. Audit sosial Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) menemukan 41% rumah tangga belum memiliki sanitasi layak dan aman, dan hanya 20% rumah tangga yang terhubung dengan jaringan pipa air bersih.

Berikut adalah matriks permasalahan di wilayah studi berdasarkan aspek sanitasi, air bersih persampahan, dan infrastruktur:

Matriks Perbandingan Isu di 4 Wilayah KPPI

Aspek	Makassar (Tallo, Buloa, Kaluku Bodoa)	Balikpapan (Manggar Baru)	Karawang (Tanah Timbul)	Surabaya (Kedung Cowek)
Air Bersih	Bergantung tadah hujan dan air beli mahal; sumur bor mangkrak; perpipaan ada tapi tidak mengalir	Air ledeng dan sumur gali tersedia, tapi sumur rawan pencemaran	Sumur artesis swadaya, kualitas buruk, banyak beli air mahal	Mayoritas pakai PDAM, tapi distribusi tidak lancar; sebagian beli air
Sanitasi dan Limbah	Septictank rusak/ tidak berfungsi; limbah dialirkan ke laut/selokan	Toilet pribadi ada, tapi limbah dibuang ke sungai/laut	Banyak tidak punya jamban; masih buang hajat di sungai/perahu	94% punya jamban, tapi tidak layak; septictank terendam rob dan dibuang ke sungai
Persampahan	Dibakar/dibuang ke laut/kolong rumah; TPS terbatas, pengangkutan tidak rutin	Banyak buang sampah ke sungai/laut/kolong rumah	Dibuang ke sungai/ selokan, dibakar; TPS tidak tersedia	TPS terbatas, tong sampah pribadi ada, tapi masih banyak buang sembarangan
Infrastruktur	Jalan becek, jembatan putus, drainase rusak; rawan rob	Rumah panggung di rawa, selokan rusak, jalan penghubung rapuh	Jalan setapak becek, selokan dangkal, jembatan rawan; rawan banjir rob	142 titik genangan rob; selokan tersumbat; MCK umum terbengkalai
Dampak Kesehatan	Diare, gatal-gatal, panas dingin	Diare, malaria, gatal-gatal	Diare, kolera, polio, DBD, chikungunya, tipus	TB, asma, infeksi kulit, kanker darah
Karakter Utama	Krisis air bersih dan sanitasi	Masalah limbah dan sampah pesisir	Sanitasi dasar terburuk, banyak ODF (open defecation)	Distribusi air dan limbah tidak optimal, penyakit menular tinggi

Sumber: Hasil Audit Sosial KPPI dan Perkumpulan Inisiatif, diolah FITRA

2. TKD Berpengaruh Besar Terhadap Peningkatan Layanan WASH

RPJMN 2025–2029 menegaskan bahwa infrastruktur dasar dan kesehatan merupakan prasyarat penting bagi upaya pengurangan kemiskinan. Namun, penurunan alokasi TKD pada 2025 dan kemungkinan berlanjut pada 2026 membuat target penanggulangan kemiskinan terancam sulit tercapai. Upaya pemerintah untuk memperkuat regulasi dan mekanisme teknis—seperti penggunaan e-Katalog terbaru, penguatan petunjuk teknis, serta penerapan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)—belum sepenuhnya cukup menutup kesenjangan fiskal tersebut.

Tantangan implementasi kebijakan masih nyata di banyak daerah, sehingga memperlambat pencapaian target pembangunan. Hambatan berupa keterlambatan pemenuhan syarat administrasi, minimnya kesiapan teknis, serta kesulitan pengadaan barang sesuai standar dan waktu berkontribusi pada rendahnya penyerapan anggaran. Kondisi ini tercermin dari realisasi DAK Fisik per September 2025 yang hanya mencapai 16,6%, jauh di bawah harapan untuk mendukung layanan dasar dan pengurangan kemiskinan.

3. Penurunan TKD memperparah Layanan Dasar WASH khususnya di Pesisir

FITRA melakukan kajian analisis TKD secara khusus pada DAK Fisik di bidang Sanitasi, Air Bersih dan Kesehatan di 13 daerah yaitu Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kota Palembang, Kota Bandung, Kab Karawang, Kab Tangerang, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Makassar, Kota Balikpapan, Kab Lombok Tengah, Kab Lombok Timur dan Kota Kupang. Hasil analisis tersebut

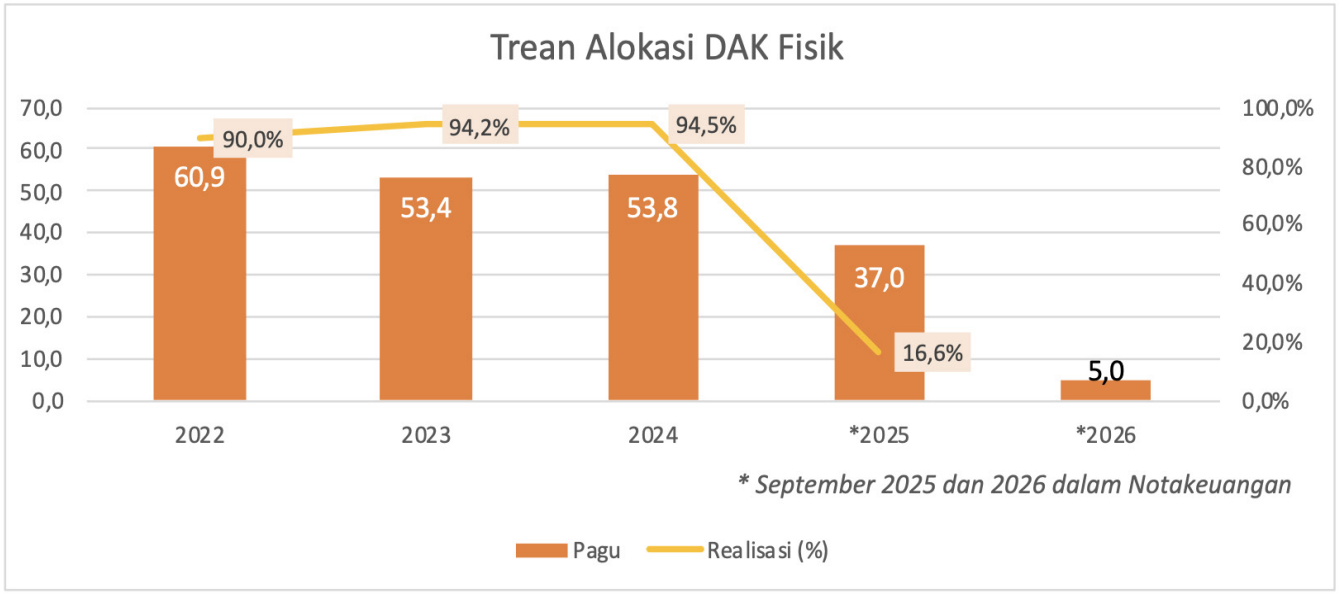

Sumber : https://djpk.kemenkeu.go.id/, diolah FITRA

adalah sebagai berikut:Asas Domein Verklaring dari era kolonial masih membayangi, di mana tanah tanpa hak eigendom berisiko beralih ke negara. Ketiadaan legalitas yang jelas ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup komunitas nelayan tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas di wilayah pesisir.

Berdasarkan grafik di atas, alokasi DAK Fisik bidang sanitasi, air bersih, dan kesehatan di 13 daerah studi tahun 2024 mencapai Rp 325,4 miliar atau 60% dari total alokasi DAK Fisik. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar Rp 231,5 miliar. Kabupaten Lombok menerima alokasi terbesar. Kondisi ini sejalan dengan temuan BPS 2024 yang mencatat Umur Harapan Hidup (UHH) di NTB masih lebih rendah dibanding rata-rata nasional akibat tingginya kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak terpenuhi, rendahnya akses air minum layak, serta sanitasi yang belum memadai. Idealnya, pada 2025 intervensi anggaran harus ditingkatkan, namun penurunan alokasi di 2025 dan potensi berlanjut di 2026 justru berisiko memperburuk kondisi tersebut.

Tantangan serupa juga dihadapi daerah di Pulau Jawa, seperti Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Surabaya, Kota Semarang, dan Kabupaten Tangerang. Daerah-daerah tersebut masih mengalami keterbatasan integrasi infrastruktur air minum dan sanitasi, kesenjangan ketersediaan infrastruktur antar kawasan, serta ketimpangan akses fisik dan sosial-ekonomi, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

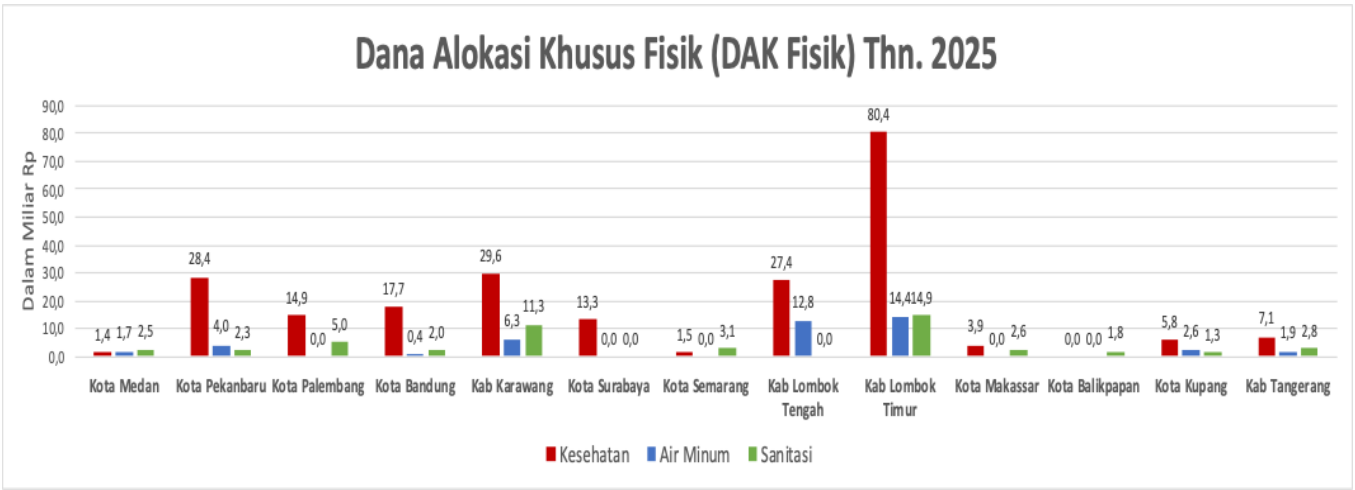

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/, diolah FITRA

Sementara itu, target akses air minum aman dan perpipaan dalam RPJMN 2025–2029 berpotensi sulit dicapai karena tidak selaras dengan komitmen anggaran. Pemerintah menargetkan 42% akses air minum aman dan 40,2% akses air minum perpipaan, tetapi pagu DAK Tahun 2026 hanya sebesar Rp 151,1 triliun. Data lapangan pun menunjukkan kesenjangan serius: hasil audit sosial mencatat 41% rumah tangga belum memiliki sanitasi aman dan hanya 20% yang terhubung jaringan perpipaan, sementara SKAM-RT Kemenkes 2023 menunjukkan akses air minum baru 20,49% dan data Kementerian PUPR 2024 mencatat capaian perpipaan baru 30,12%.

4. Kelompok Rentan Secara Khusus Perempuan Pesisir Paling Terdampak pada Krisis Layanan

Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terdampak minimnya akses layanan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Pemetaan partisipatif tahun 2023 menunjukkan bahwa perempuan memikul tanggung jawab utama dalam keluarga untuk memastikan ketersediaan air bersih, fasilitas sanitasi, dan pengelolaan sampah. Siklus harian kerja mereka sangat panjang, di mana sekitar 80% perempuan bekerja 14–18 jam per hari, mulai dari aktivitas produktif sejak pukul 02.00–04.00 dini hari hingga baru dapat beristirahat antara pukul 18.00–22.00. **Kondisi ini menegaskan adanya beban ganda perempuan dalam penyediaan layanan dasar rumah tangga, diperparah lagi dampak perubahan iklim dan bencana. Beban ganda tersebut pada akhirnya mencerminkan bentuk penindasan yang dialami perempuan pesisir.**

5. Alih Fungsi Lahan dan Krisis Layanan Dasar di Permukiman Pesisir

Pemenuhan layanan dasar seperti sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah di delapan kawasan permukiman pesisir menghadapi tantangan struktural yang serius. Persoalan utama bukan semata kekurangan infrastruktur, tetapi menyangkut status dan penguasaan lahan. Banyak wilayah pesisir berstatus Hak Pakai, HPL, maupun HGB yang dikuasai Pelindo, Perhutani, atau dialihfungsikan melalui proyek-proyek strategis nasional (PSN). Proyek seperti Surabaya Waterland atau PIK 2 di Tangerang menunjukkan bagaimana kepentingan bisnis dan pembangunan berskala besar kerap mengorbankan ruang hidup masyarakat pesisir. Alih fungsi lahan ini mempersempit kawasan hunian, membatasi akses masyarakat terhadap ruang publik, dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian terhadap hak dasar mereka atas layanan WASH.

Selain itu, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan WASH juga diperburuk oleh status kepemilikan tanah yang dikuasai pihak lain. Banyak kepala daerah tidak berani mengalokasikan anggaran maupun membangun infrastruktur dasar karena lahan yang ditempati masyarakat bukan milik pemerintah. Contohnya, di Kota Semarang walikota enggan membangun jaringan perpipaan karena tanah berstatus milik Pelindo; di Makassar situasi serupa terjadi; sedangkan di Medan pembangunan sumur bor bahkan tidak dapat dianggarkan dalam APBD. Kondisi ini menunjukkan bagaimana ketidakjelasan status tanah langsung menghambat pemenuhan hak dasar masyarakat pesisir terhadap layanan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Lebih jauh, tekanan akibat kepadatan penduduk dan keterbatasan ruang memperparah kerentanan yang ada. Permukiman yang semakin padat melahirkan pola konsumsi tinggi tanpa diimbangi sistem pengelolaan sampah dan sanitasi yang memadai. Situasi ini menimbulkan krisis ganda: pertama, bertambahnya volume sampah yang sulit dikelola; kedua, keterbatasan ruang untuk instalasi sanitasi dan air bersih.

Foto tumpukan sampah di dekat tempat penjemuran ikan

REKOMENDASI:

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas sebagai hasil dari analisis Koalisi PRIMA baik dari audit sosial maupun kajian anggaran, maka kami merekomendasikan sebagai berikut :

1. Koalisi PRIMA mendorong Pemerintah konsisten mengalokasikan anggaran untuk DAK Fisik Bidang Air, sehingga target RPJMN 2025-2029 terhadap akses air minum aman dan akses air minum perpipaan secara berturut-turut sebesar 42 % dan 40,2 % dapat tercapai. Hal ini merespon atas permasalahan krisis layanan dasar WASH telah terjadi di Kawasan Pesisir.
2. Koalisi PRIMA mendorong Pemerintah memprioritaskan DAK Fisik Bidang Air Minum dan Sanitasi untuk wilayah-wilayah pesisir. TKD sangat berperan dalam meningkatkan Layanan WASH, dan penurunan TKD dapat memperparah Krisis Layanan Dasar WASH khususnya di Pesisir.
3. Kelompok Rentan Secara Khusus Perempuan Pesisir Paling Terdampak Pada Krisis Layanan WASH. Untuk temuan ini, kami memberikan rekomendasi:
    - Mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) segera membentuk Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang mengedepankan keterlibatan kelompok perempuan dan organisasi masyarakat sipil.
    - Mendesak Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengoptimalkan Pokja PKP untuk pemenuhan akses air minum/bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah, termasuk masalah rob dan abrasi di kawasan permukiman/kampung pesisir.
4. Koalisi PRIMA mendesak Pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan untuk mendapatkan pemukiman dan lahan pangan yang layak untuk hidup sejahtera. Hal ini menuntut keselarasan kebijakan antar-Kementerian ATR/BPN, KKP, dan KLHK terkait penerbitan AHT di wilayah pesisir.

REFERENSI:

1. Audit Sosial layanan air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah pada Kampung Pesisir di 9 Kab/Kota (Medan, Tangerang, Karawang, Semarang, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Lombok Timur) dengan melibatkan 1.951 responden (rumah tangga).
2. Audit sosial layanan air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah pada kampung kota di 5 kelurahan (Jati Pulo, Keagungan, Kedoya Utara, Tomang, Kapuk) di Jakarta Barat dengan 1.025 responden (rumah tangga).
3. https://en.antaranews.com/news/324595/bmkg-stresses-south-south-collaboration-to-tackle-rising-sea-levels
4. https://dsda.jakarta.go.id/detail-artikel/jakarta-alami-penurunan-tanah-rata-rata-39-cm-sepanjang-2023/19?utm_source=chatgpt.com
5. Audit Sosial terhadap Kampung Pesisir di 9 Kab/Kota (Medan, Tangerang, Karawang, Semarang, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Lombok Timur) dengan melibatkan 1.951 responden (rumah tangga).

Ditulis oleh:

1. Niko Amrulloh (DPP KNTI) 0812-9787-5162
2. Rosinah (DPP KPPI) 0823-3888-9848
3. Siska Barimbing (Seknas FITRA) 0813-9685-5725
4. Bernard Allvitro (Seknas FITRA) 0813-8329-6414
5. Pius Widiyatmoko (Perkumpulan INISIATIF) 0812-2440-5601

Koalisi PRIMA (Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran)

LAMPIRAN I. GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN

1. Kota Balikpapan

Kampung Pesisir Manggar Baru terletak di wilayah administratif Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Secara geografis, wilayah ini berada di pesisir timur Teluk Balikpapan dengan koordinat sekitar 1°8′35″ LS dan 116°57′58″ BT. Wilayah ini berbatasan langsung dengan laut di sisi timur, menjadikannya salah satu kawasan padat penduduk yang berbasis mata pencaharian laut, khususnya nelayan dan pengolah hasil tangkapan. Kelurahan ini berasal dari pemekaran wilayah Kelurahan Manggar dan Kelurahan Lamaru yang terjadi pada tahun 1970, sebagai respon terhadap pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan pengelolaan wilayah. Pengesahan resmi sebagai kelurahan dilakukan pada tahun 1980.

Jumlah penduduk Manggar Baru mencapai sekitar 18.600 jiwa, dengan kepadatan lebih dari 490 jiwa per km². Komunitasnya terdiri dari berbagai etnis seperti Bugis, Bajo, Madura, Banjar, dan Jawa, mencerminkan sejarah migrasi pesisir Balikpapan. Penduduk mayoritas bekerja di sektor informal, antara lain sebagai nelayan, buruh pelabuhan, pengolah hasil laut rumahan, pemulung, dan pekerja kasar lainnya. Kelurahan Manggar Baru terbagi ke dalam empat zona utama sebagai strategi pengelolaan sosial dan wilayah, yaitu Zona Trans, Zona TPI, Zona BTN dan Zona Tanjung Kelor.

Rob dan Titik Genangan

Manggar Baru terletak di pesisir timur Kota Balikpapan dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar, sehingga berpotensi mengalami banjir rob. Wilayah-wilayah yang paling rentan terhadap rob biasanya berada di zona pesisir seperti Zona TPI dan sebagian Zona Tanjung Kelor, karena kedekatannya dengan garis pantai dan aktivitas kenelayanan. Berdasarkan pemetaan titik-titik persebaran genangan air karena rob tergambar di bawah ini.

Infrastruktur Lingkungan

Infrastruktur lingkungan meliputi air bersih, sanitasi dan pengelolaan sampah. Persebaran pengamatan tersaji sebagai berikut :

	Jumlah
Sumber air dan bak penampungan	20
Perpipaan dan penyaluran air bersih	1
Tangki air dan sambungan rumah	0
Persampahan	51
Selokan	53
Septictank dan pembuangan limbah	6
MCK Umum (Mandi, Cuci, Kakus)	0
Jalan, Jembatan, Gang, Setapak dan Akses lainnya	4

Sumber : Pemetaan Partisipatif 2025

Pengamatan banyak dilakukan terhadap sumber air dan bak penampungan, persampahan dan permasalahan yang terjadi terhadap selokan. Uraian permasalahan sumber air dan bak penampungan terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. Permasalahan Sumber Air dan Penampungan

	Jumlah
Sumber air tidak terlindungi dan mudah terkena kotoran	17
Bak air dekat dengan sumber polusi (septik, cubluk, pestisida, sampah, comberan, dll)	3
Bak air tidak tertutup sempurna	8
Bak air dipenuhi sedimen/endapan	1
Permasalahan selain yang telah tersebut diatas	0

Sumber : Pemetaan Partisipatif 2025

Perlindungan terhadap sumber air yang dipakai warga kampung pesisir penting diperhatikan karena kerentanan mengkonsumsi air bersih yang tidak layak dan potensi genangan pada sumber air menjadi sarang jentik nyamuk.

Permasalahan persampahan yang diamati sebagian besar karena ketiadaan tempat sampah di rumah tangga, di samping pelayanan TPS yang kurang optimal, baik ketersediaan, daya tampung TPS maupun jadwal angkut sampah dari TPS. Akibatnya warga kampung pesisir memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan dan berbagai tempat seperti sungai, kolong dan sela-sela rumah panggung, pinggir jalan menjadi tempat pembuangan.

Tabel. Permasalahan Sampah

	Jumlah
Tidak ada tempat sampah rumah tangga	44
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) penuh	4
Tidak ada pengangkutan sampah dari TPS	14
Tidak ada Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	23
Permasalahan selain yang telah tersebut diatas	12

Sumber : Pemetaan Partisipatif 2025

Permasalahan Selokan sebagai infrastruktur lingkungan kampung pesisir menjadi tantangan sendiri. Hasil pengamatan menunjukkan fungsi pengaliran air tidak berjalan baik karena tidak ada rutinitas pemeliharaan (pengerukan, misalnya) sehingga terjadi sedimentasi atau karena kerusakan saluran itu sendiri. Selokan juga menjadi tempat pembuangan air limbah WC/kamar mandi rumah tangga sehingga membuatnya potensial menjadi sarang penyakit.

Tabel. Permasalahan Selokan

	Jumlah
Tertutup sedimentasi	21
Airnya tergenang/tidak mengalir lancar	51
Digunakan membuang air limbah WC & kamar mandi rumah tangga	10
Saluran rusak	20
Permasalahan selain yang telah tersebut diatas	7

Sumber : Pemetaan Partisipatif 2025

Selanjutnya, untuk permasalahan akses yang dilaporkan lebih karena abai terhadap aspek pemeliharaan baik jalan di darat maupun jalan kayu penghubung antar rumah panggung.

	Jumlah
Becek	0
Berlubang	3
Ramai lalulintas	0
Banyak hambatan	2
Permasalahan selain yang telah tersebut diatas	2

Sumber : Pemetaan Partisipatif 2025

2. Kota Makassar

Di pesisir utara Kota Makassar, tiga kampung nelayan—Tallo, Buloa, dan Kaluku Bodoa—menjadi cermin nyata bagaimana layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah belum sepenuhnya hadir sebagai hak warga. Laporan ini menghadirkan suara dan pengalaman masyarakat pesisir dalam menghadapi krisis sehari-hari.

Lebih dari 40 ribu jiwa tinggal di tiga kelurahan pesisir Kecamatan Tallo. Kaluku Bodoa menjadi yang terpadat dengan lebih dari 23 ribu jiwa, sementara Tallo dan Buloa masing-masing dihuni hampir 10 ribu jiwa. Laki-laki dan perempuan hampir seimbang jumlahnya, tetapi kepadatan dan keterbatasan lahan membuat kehidupan sehari-hari mereka penuh tantangan.

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Total
Tallo	4823	4648	9471
Buloa	4447	4298	8745
Kaluku Bodoa	11847	11426	23273

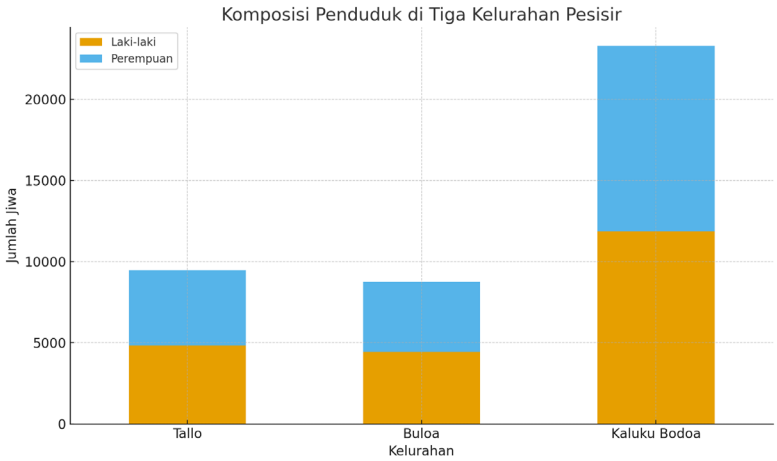

Air Bersih: Hak yang Masih Mahal

Air bersih di pesisir Makassar belum menjadi layanan publik yang mudah diakses. Mayoritas keluarga nelayan harus membeli air dengan biaya Rp150.000–350.000 per bulan. Biaya ini sangat berat jika dibandingkan dengan penghasilan nelayan kecil yang tidak menentu. Ironisnya, wilayah Makassar Utara justru menerima suplai PDAM lebih sedikit dibandingkan kawasan lain.

Rentang Biaya (Rp)	Jumlah Rumah Tangga
150-299 ribu	25
300-349 ribu	30

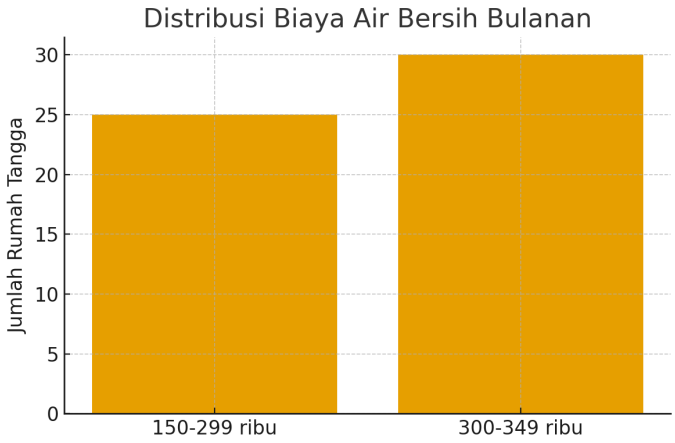

Sanitasi: Antara Septic tank Mati dan WC laut

Sanitasi menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Banyak septic tank tidak berfungsi, bahkan ada yang langsung membuangnya ke laut. Kondisi ini menimbulkan bau tidak sedap dan memperbesar risiko penyakit. MCK umum pun tidak layak pakai, seringkali tanpa air, dan tidak ramah bagi perempuan maupun penyandang disabilitas.

Sampah: Dari Kolong Rumah ke Laut

Di Buloa, ruang kosong di bawah rumah panggung sering dijadikan tempat pembuangan sampah. Di Tallo dan Kaluku Bodoa, banyak warga membuang sampah ke laut atau sungai. TPS tidak mencukupi, pengangkutan sampah tidak rutin, dan pada akhirnya kebiasaan lama tetap berlangsung. Adaptasi warga menggunakan sampah sebagai bahan urug rumah panggung justru memperburuk kualitas lingkungan.

Kategori	Jumlah Permasalahan
Air Bersih	45
Sanitasi	30
Sampah	51

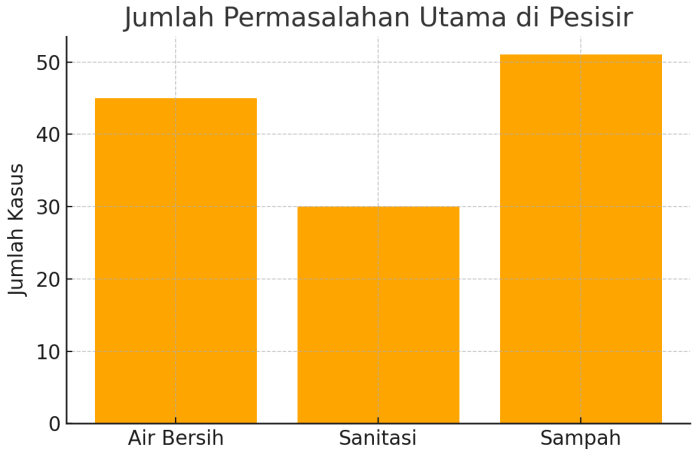

Banyak Program, Minim Integrasi
Dari program RISE dengan smart septic tank hingga Je'ne Tallasa yang memanen air hujan, program-program masuk silih berganti. Namun, tanpa integrasi, semua berakhir sebagai proyek parsial. Warga tetap menghadapi antrean air, septic tank mati, dan sampah menumpuk. Audit sosial menunjukkan masalah utama ada pada tata kelola yang belum berpihak sepenuhnya pada keadilan sosial.

3. **Kota Surabaya**

Kampung Nambangan dan Cumpat, di Kelurahan Kedung Cowek, Surabaya, adalah potret nyata kampung pesisir yang menghadapi tantangan berat. Krisis air bersih, sanitasi yang buruk, serta pengelolaan sampah yang minim membuat masyarakat pesisir rentan dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Di Nambangan, sekitar 408 KK atau 700 jiwa bermukim dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan. Perempuan berperan penting dalam pengolahan hasil laut seperti ikan kering dan kerupuk ikan. Di Cumpat, jumlah KK lebih kecil, tetapi kondisi sosial-ekonomi serupa, dengan tambahan aktivitas UMKM hasil laut.

Kampung	Kepala Keluarga	Populasi	Profesi Dominan	Peran Perempuan
Nambangan	408 KK	±700 jiwa	Nelayan	Olahan hasil laut
Cumpat	±300 KK	±600 jiwa	Nelayan	UMKM hasil laut

Air Bersih: Antara Mahal dan Terbatas
Mayoritas rumah tangga mengeluarkan Rp25.000–100.000 per bulan untuk air bersih, meski ada yang mencapai Rp300.000. Kualitas air pun belum sepenuhnya aman, hanya 61% yang tidak berbau, berasa, atau berwarna.

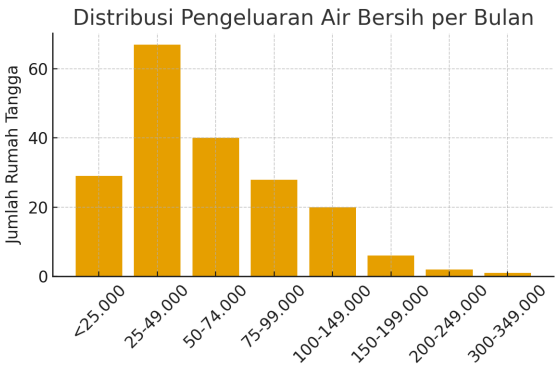

Sanitasi
Meskipun banyak rumah sudah memiliki jamban, kualitasnya sering tidak layak: pintu tidak standar, lantai licin, dan septic tank terendam rob. Sebagian besar limbah akhirnya dialirkan ke laut atau tambak, memperburuk kualitas lingkungan.

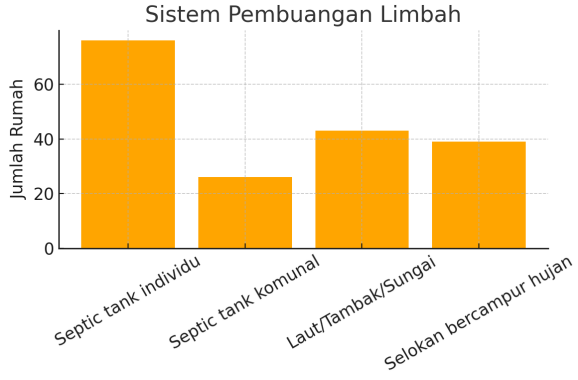

Persampahan
Tidak ada sistem pengelolaan sampah yang jelas. Sampah ditumpuk sementara, dibuang ke lahan kosong, bahkan sebagian ke pantai. Kondisi ini menambah beban lingkungan sekaligus risiko kesehatan masyarakat.

Dampak Kesehatan
Sanitasi yang buruk berdampak langsung pada kesehatan warga. Penyakit paling banyak adalah batuk (33 kasus), pilek (25), dan demam (11). Selain itu ditemukan juga kasus TB, asma, dan gangguan paru-paru meski jumlahnya lebih kecil.

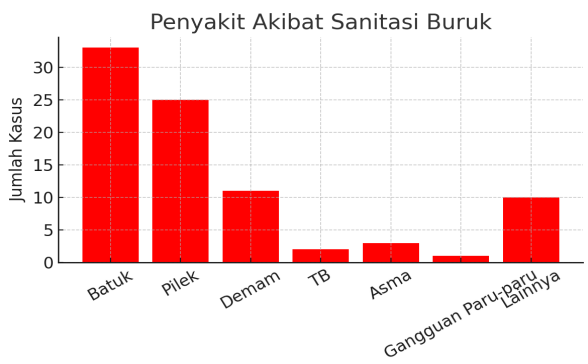

4. Kabupaten Karawang

Dusun Tanah Timbul di Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang, adalah kampung pesisir yang dihuni mayoritas nelayan. Kawasan ini menghadapi persoalan klasik pesisir: rob, banjir, akses air bersih terbatas, sanitasi buruk, dan sampah yang tidak tertangani.

Desa Muara memiliki 5.071 jiwa (2.664 laki-laki, 2.407 perempuan) dengan 1.702 KK. Kepadatan penduduk mencapai 335 jiwa/km². Wilayah Tanah Timbul rentan banjir rob dan luapan sungai, sehingga mempengaruhi aktivitas nelayan dan pemukiman warga.

Air Bersih

Sebagian besar warga mengandalkan sumur artesis dan membeli air eceran. Pengeluaran bulanan berkisar Rp25.000–350.000. Namun, kualitas air masih bermasalah, banyak yang berbau, berasa, atau berwarna.

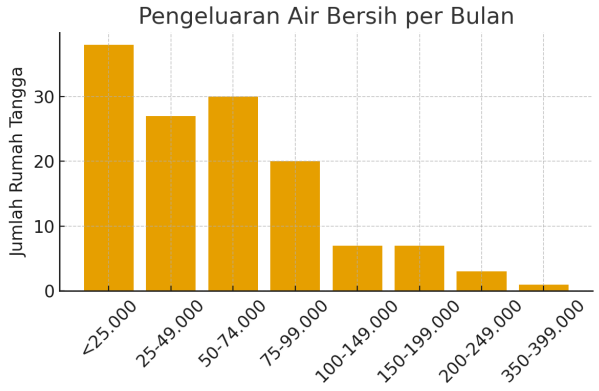

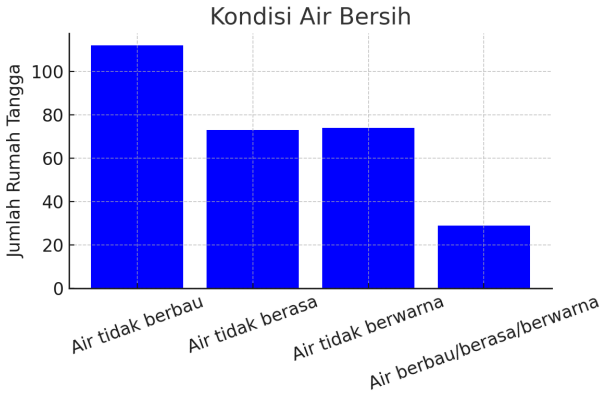

Sanitasi dan Limbah

Sebagian rumah memiliki septic tank individual, namun banyak juga yang membuang limbah langsung ke selokan atau sungai. Hal ini menimbulkan pencemaran dan risiko kesehatan.

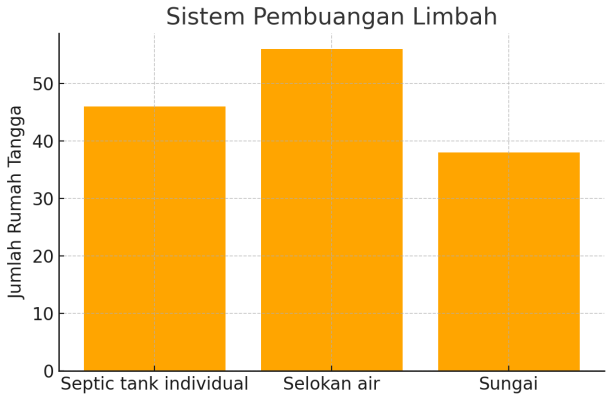

Sampah

Pengelolaan sampah belum tersedia. Sebagian besar warga membakar sampah di dekat rumah, sebagian lainnya membuang ke TPS sementara, dan sebagian kecil ke badan air. Kondisi ini memperburuk kesehatan lingkungan.

Dampak Kesehatan

Buruknya kondisi air, sanitasi, dan sampah berdampak pada tingginya kasus penyakit. Gatal-gatal (64 kasus), kolera (51), diare (47), dan demam berdarah (38) adalah yang paling banyak. Hal ini menunjukkan urgensi perbaikan lingkungan

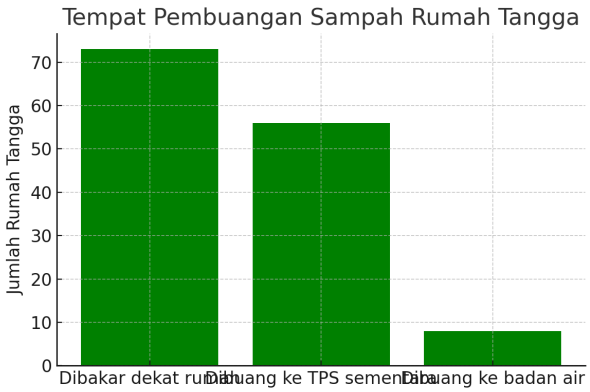

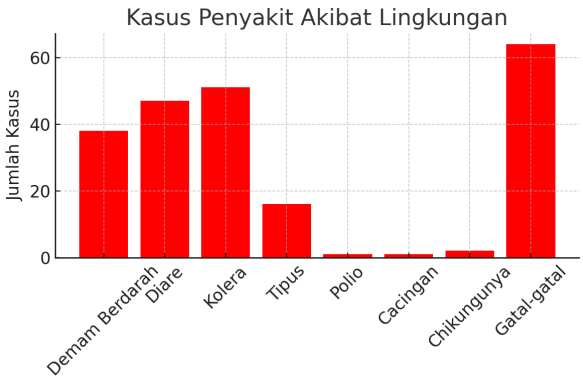

LAMPIRAN II. Matriks Regulasi WASH

Bidang	Regulasi	Substansi Utama	Relevansi untuk Pesisir	Catatan
Air Bersih	UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Hak atas air, pengelolaan SDA berbasis wilayah sungai, penyediaan air untuk kebutuhan dasar	Penting untuk wilayah pesisir yang sering menghadapi intrusi air laut	Perlu implementasi teknis khusus (desalinasi, sumur resapan, air hujan)
	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Urusan wajib pelayanan dasar termasuk air bersih	Pemda kabupaten/ kota pesisir wajib menyediakan layanan dasar air minum	Kewenangan daerah pesisir sering terkendala akses geografis
	Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum	Percepatan pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	Relevan untuk desa pesisir yang sulit akses PDAM	Pesisir butuh teknologi khusus (pipa bawah laut, air baku terbatas)
	Permen PUPR No. 27/ PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM	Pedoman teknis penyediaan air minum	Arah teknis pembangunan sistem air di desa pesisir	Sering sulit diterapkan di pulau kecil terpencil
Sanitasi	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Lingkungan sehat, sanitasi sebagai bagian hak kesehatan	Sanitasi buruk di pesisir berdampak langsung ke kesehatan nelayan	Masalah jamban terapung, pencemaran laut
	Perpres No. 185 Tahun 2014 & RPJMN 2020–2024	Akses universal sanitasi layak	Target 100% sanitasi layak termasuk di pesisir	Realisasi rendah di kampung nelayan
	Permen PUPR No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan	Drainase dan pengendalian banjir	Relevan untuk pesisir rawan rob & genangan	Belum adaptif dengan karakter banjir pasang laut
Sampah	UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), larangan pembuangan ke laut	Sangat penting karena sampah pesisir berdampak ke ekosistem laut	Implementasi lemah di kampung nelayan
	Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah	Target pengurangan 30% dan penanganan 70% sampah 2025	Pesisir termasuk prioritas karena sumber sampah plastik laut	Desa pesisir sering tidak masuk skema prioritas
	Perpres No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut	Rencana aksi nasional pengurangan sampah laut	Spesifik pada ekosistem pesisir dan laut	Sangat relevan: fokus sampah nelayan, pariwisata bahari
	Permen LHK No. P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen	Kewajiban produsen mengurangi sampah plastik	Pesisir terkena dampak sampah kemasan sekali pakai	Perlu dukungan ekonomi sirkular di pesisir

Sumber : Hasil Analisis KNTI/KPPI, 2025